

PERAN PEMERINTAHAN ORDE BARU DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Nova Anisa, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail : Anisanova2023@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

This national development policy is also known as the development trilogy and eight paths to equality. The development trilogy consists of three areas, namely: first, dynamic national stability; second, rapid economic growth; and third, equal distribution of development and its results. The development trilogy then became the development mantra of the Soeharto government. When growth reaches a plateau or plateau, it is expected to have an equally slowing impact. This national development policy is also known as the development trilogy and eight paths to equality. The development trilogy consists of three areas, namely: first, dynamic national stability; second, rapid economic growth; and third, equal distribution of development and its results. The development trilogy then became the development mantra of the Soeharto government. When growth reaches its peak or peak, it is expected to have an equally slowing impact. As part of national development, GBHN is a general model of long-term development and PELITA (five-year development) is a general model.

Abstrak

Kebijakan pembangunan nasional ini dikenal juga dengan trilogi pembangunan dan delapan jalan menuju kesetaraan. Trilogi pembangunan tersebut terdiri dari tiga bidang, yaitu: pertama, stabilitas nasional yang dinamis; kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat; dan ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan kemudian menjadi mantra pembangunan pemerintahan Soeharto. Ketika pertumbuhan mencapai puncak atau puncaknya, hal tersebut diperkirakan akan mempunyai dampak yang sama melambatnya. Pemerintahan Orde Baru menjadikan stabilisasi dan pembangunan ekonomi/politik sebagai landasan pemerintahannya, dengan menekankan pentingnya manajemen, keterampilan teknis, dan pembangunan ekonomi. Setelah situasi krisis teratasi, pemerintah mulai fokus melaksanakan program pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan ideal dan konstitusional bagi terwujudnya pembangunan. Sementara itu, sistem operasi dan model dasarnya berpedoman pada Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN), Sebagai bagian dari pembangunan nasional, GBHN merupakan model umum pembangunan jangka panjang dan PELITA (pembangunan lima tahun) merupakan model umum.

PENDAHULUAN

Pengalaman di Indonesia, isu tentang kebijakan pembangunan nasional mengemuka kembali dan dilekatkan dengan agenda politik amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI) untuk menambah kewenangan MPR dalam menetapkan Pokok Haluan Negara atau sering disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Melalui amandemen terbatas, MPR bermaksud menambahkan satu ayat pada Pasal 3 untuk memberi kewenangan MPR mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan satu ayat pada Pasal 23 untuk mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN (Kompas Online, 2021). Frasa amandemen terbatas merujuk

pada komitmen faksi-faksi di MPR agar amandemen ke 5 UUD NRI tidak meluas pada pasal-pasal lain mengingat saat ini muncul wacana perubahan Pasal 7 UUD NRI untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan memperkuat kewenangan DPD, terutama fungsi legislasi dan penganggaran sebagaimana yang dimiliki oleh DPR.

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998 merupakan masa penting dalam sejarah pembangunan negara. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mengalami perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan politik. Pada pendahuluan ini kami mengkaji peran pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan nasional Indonesia. Jika kita melihat kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan saat itu, maka kita dapat memahami bagaimana kontribusi pemerintahan Orde Baru dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat infrastruktur negara, dan menjaga stabilitas politik. Dengan menganalisis peran pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan negara, kita dapat mengkaji dampaknya terhadap perkembangan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Dengan memahami lebih dalam warisan pemerintahan Orde Baru, kita dapat mengapresiasi kontribusi dan kontroversi yang terkait dengan periode ini dalam sejarah pembangunan Indonesia.

Jatuhnya rezim Orde Lama, pemerintahan Orde Lama 1966. Pada saat yang sama, sistem pemerintahan Orde Baru berubah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer. Istilah Orde Baru pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu orde yang berarti waktu atau zaman dan baru yang berarti sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jika diartikan secara fundamental, Orde Baru adalah zaman atau jaman baru. Sementara itu, jika mengacu pada KBBI, maka Orde Baru diartikan sebagai pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia, yang berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan tanggal 20 Mei 1998, sebagai tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang pulih. . Dengan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soeharto sendiri mengartikan Orde Baru sebagai pemerintahan yang mempunyai sikap dan tekad yang mendalam untuk mengabdikan pada rakyat dan kepentingan nasional berdasarkan falsafah Pancasila serta mengikuti asas dan landasan UUD 1945 menurut Nugroho Notosusanto dan inti.

Orde Baru adalah seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan kehidupan negara dalam kaitannya dengan ketertiban yang akan mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menghadapi tugas berat untuk menghentikan proses perekonomian. menolak dan mencoba untuk bertindak sesegera mungkin untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, lebih fokus pada operasi penyelamatan. Pemerintahan Orde Baru menjadikan stabilisasi dan pembangunan ekonomi/politik sebagai landasan pemerintahannya, dengan menekankan pentingnya manajemen, keterampilan teknis, dan pembangunan ekonomi. Setelah situasi krisis teratasi, pemerintah mulai fokus melaksanakan program pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan ideal dan konstitusional bagi terwujudnya pembangunan. Sementara itu, sistem operasi dan model dasarnya berpedoman pada Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN). Sebagai bagian dari pembangunan nasional, GBHN merupakan model umum pembangunan jangka panjang dan PELITA (pembangunan lima tahun) merupakan model umum.

GBHN juga berfungsi sebagai indikator arah pembangunan negara, indikator keberhasilan, dan alat evaluasi. Kebijakan pembangunan nasional ini dikenal juga dengan trilogi pembangunan dan delapan jalan menuju kesetaraan. Trilogi pembangunan tersebut terdiri dari tiga bidang, yaitu: pertama, stabilitas nasional

yang dinamis; kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat; dan ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan kemudian menjadi mantra pembangunan pemerintahan Soeharto. Ketika pertumbuhan mencapai puncak atau puncaknya, hal tersebut diperkirakan akan mempunyai dampak yang sama melambatnya. Akibat booming minyak yang dimulai pada tahun 1973, terjadi perbaikan signifikan pada perekonomian Indonesia, yang juga berdampak positif terhadap pembangunan. Sejak Pelita II, anggaran pembangunan melebihi anggaran pemerintah karena peningkatan pendapatan ekspor minyak mentah.

Bangsa ekspor migas terhadap nilai ekspor tumbuh rata-rata 75,2 persen per tahun. Anggaran pembangunan meningkat menjadi 274 persen pada Repulse III. Pendapatan dari ledakan minyak memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek ambisius yang padat modal atau untuk berpartisipasi langsung dalam produksi. Agar pembangunan dapat berjalan optimal dan merata, alokasi dan distribusi sumber daya juga harus merata. Namun penduduknya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saat itu. Tanah Pulau Jawa menjadi begitu subur berkat adanya gunung berapi sehingga Pulau Jawa dahulu kala, bahkan berabad-abad yang lalu, menjadi salah satu kawasan pertanian paling produktif di dunia. Keadaan ini sebenarnya bukan hal yang baru, pada awal abad ke-20 masyarakat Hindia Belanda menghadapi permasalahan serius akibat tidak terkendalinya pertumbuhan kesejahteraan penduduk asli Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

PEMBAHASAN

Bermula dari orientasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi kebijakan pembangunan pada masa orde baru itulah, maka tercipta ketidakmerataan pembangunan infrastruktur produksi maupun industry terutama di wilayah luar

Jawa dan Indonesia Timur yang berdampak pada munculnya ketimpangan pembangunan yang bersifat regional (regional disparity).²⁷ Lemahnya perhatian pada aspek pemerataan regional kemudian melahirkan berbagai masalah ketertinggalan yang berkepanjangan dan menjadi agenda penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pada pemerintahan yang lahir pasca orde baru. Seiring dengan perubahan politik di tingkat nasional melalui gerakan reformasi tahun 1998, tekanan dan desakan untuk segera mengatasi ketimpangan antarwilayah kemudian melahirkan sejumlah konsep reformulasi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca tumbanganya kekuasaan orde baru.³⁰ Munculnya perhatian terhadap persoalan ketertinggalan daerah khususnya di KTI merupakan buah dari perubahan yang dibawa oleh arus reformasi, yakni menghendaki adanya perubahan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi menjadi desentralistik dengan mengutamakan pemerataan pembangunan.

Dibentuknya suatu urusan pemerintahan tertentu yang secara khusus menangani permasalahan pembangunan di KTI pada masa pemerintahan Gus Dur-Megawati di tahun 2000, yang kemudian secara institusional dilaksanakan oleh Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Kemenmud PPKTI) merupakan bentuk responsi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan antarwilayah sebagai dampak dari pembangunan yang tidak merata khususnya di KTI. Merujuk pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda, tujuan dibentuknya Kemenmud PPKTI pada prinsipnya adalah untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.

Bergeser ke masa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz, kemudian nomenklatur Kemenmud PPKTI diubah menjadi Kementerian Negara PPKTI (Kemeneq PPKTI) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, tanggal 9 Agustus 2001 yang berimplikasi kepada penguatan fungsi Kemeneq PPKTI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah. Kemudian pada masa pemerintahan SBY-JK, model penanganan ketimpangan antarwilayah dilakukan dalam skala nasional dengan konsep percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) yang meliputi daerahdaerah di KBI dan di KTI. Secara institusional, dalam pelaksanaan PPDT kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai bentuk transformasi kelembagaan dari Kemeneq PPKTI. Hal tersebut didasarkan bahwa secara faktual persoalan kesenjangan antardaerah baik di KBI maupun di KTI turut memengaruhi konsentrasi arah kebijakan pembangunan nasional di awal pemerintahan SBY-JK.

Secara historis dapat dipahami bahwasanya pembentukan Kemenmud PPKTI merupakan bukti konkret upaya pemerintah dalam merespon isu ketertinggalan di KTI yang sifatnya sudah sangat mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Sehingga penanganan isu ketertinggalan wilayah di KTI diwujudkan menjadi suatu urusan pemerintahan tersendiri yang harus dibentuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi. Dalam perkembangannya kemudian, muncul fakta bahwa ketertinggalan ternyata tidak hanya di KTI, namun juga fenomena ketertinggalan wilayah dalam pembangunan juga terjadi pada beberapa wilayah di

KBI yang kemudian berdampak pada proses evolusi kebijakan dan perubahan kelembagaan pemerintahan dalam menangani ketertinggalan wilayah dalam skala nasional. Salah satu faktor berkembangnya masalah ketertinggalan wilayah tersebut diidentifikasi bermula dari massifnya pemekaran daerah pasca bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di bawah rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai agenda pembangunan bangsa yang telah berlangsung sejak kemerdekaan. Hal ini dicapai dengan memenuhi tugas pokok negara, yaitu kegiatan rutin yang mencakup tugas-tugas politik, diplomatik, hukum, dan administrasi serta perubahan terencana yang direncanakan terus menerus untuk mencapai perbaikan keadaan yang telah ditentukan (Budiarjo, 2007). Menurut Meyer (2019), pelaksanaan fungsi negara tersebut berada dalam rangka pelaksanaan tujuan utama negara \kesejahteraan masyarakat. Pembangunan negara sebagai salah satu komponen penting pembangunan negara tentunya harus dipahami sebagai suatu peristiwa kompleks yang memerlukan perencanaan, yang peran sentralnya dipegang oleh pemerintah. Patsy Healey (1997) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan di negara maju menekankan pada tiga pendekatan utama, yaitu perencanaan ekonomi, manajemen pembangunan fisik, dan manajemen administrasi publik dan analisis politik. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis penelitian perencanaan pembangunan merupakan penelitian yang bersifat multidisiplin dan produktif.

Berbagai kebijakan informasi pembangunan nasional dituangkan dalam tiga program utama, yaitu: Program Pengembangan Aksi Informasi, Program pengembangan dan pengembangan radio, televisi dan film; Program Pembinaan dan Pengembangan Jurnalistik. Selain itu dilengkapi dengan tiga program pendukung yaitu, Program Pendidikan dan Pelatihan Mesin Negara; Program penelitian dan studi kebijakan; dan Program Peran Perempuan. Tujuan dari program pengembangan informasi adalah untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta untuk lebih menggerakkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Selain itu tujuannya adalah menyebarkan informasi seluas-luasnya, sehingga menjangkau khalayak seluas-luasnya melalui media elektronik, cetak, dan informasi masyarakat, baik di dalam negeri, di pedesaan, di kota, maupun di luar negeri. Berbagai program kebijakan informasi ini juga dapat digunakan sebagai indikator, meskipun hal ini tidak dijelaskan secara jelas.

Inti dari informasi mengenai migrasi adalah untuk mempromosikan dan menanamkan pemahaman tentang kemungkinan peningkatan standar hidup di daerah migran. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat terhadap migrasi. Secara umum ada dua strategi yang digunakan untuk menerapkan informasi kepada para migran, antara lain: Aural, yaitu strategi yang diterapkan dengan cara mengunjungi penduduk yang berbeda daerah dan menjelaskan situasi dan kondisi serta kehidupan sosial ekonomi daerah tersebut. suatu asal usul yang berpotensi menimbulkan daya penggerak (displace). potensi dan situasi atau kondisi di daerah migrasi. Visual merupakan strategi yang diterapkan dengan menata slide dan film, menyebarkan brosur dan poster serta menampilkan seni tradisional.

Strategi informasi juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program migrasi. Jika melihat pemerintahan Orde Baru yang resmi berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Misalnya saja terkait dengan kemiskinan penduduk yang menjadi salah satu indikator penilaian pembangunan suatu negara. Menunjukkan bahwa kemiskinan telah berkurang secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada era pemerintahan Orde Baru tahun 1976, sekitar 54,2 juta

jiwa atau 40,08 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin, kemudian jumlah penduduk miskin menurun menjadi 22,5 juta jiwa menurut data tahun 1996. atau hanya 11,34 persen dari total penduduk Indonesia. Perekonomian tumbuh cepat. Pada Repelled I, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun. Repelled II tumbuh sebesar 7,5 persen. Repelita III tumbuh sebesar 6,5 persen. Repelled IV meningkat sebesar 5 persen dan Repelled V sebesar 5 persen. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi contoh bagaimana strategi informasi pembangunan, khususnya kebijakan informasi migrasi, juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan kepihakan pembangunan kepada daerah-daerah tertinggal dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang ditadai dengan diwujudkan pemerataan pembangunan wilayah serta berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara kesatuan republik indonesia. GBHN di masa lalu merupakan bagian dari produk politik hukum, namun secara politis difungsikan sebagai sarana kontrol sosial pemerintah. Jika ingin diterapkan kembali GBHN diarahkan tidak sekedar menunjang pembangunan nasional namun juga perbaikan kehidupan berbangsa.

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, terjadi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan modernisasi negara. Salah satu aspek utama dari peran pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Soeharto mengambil langkah-langkah besar dalam membangun jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga mendorong industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Melalui program pembangunan ekonomi seperti "Pembangunan Lima Tahun" dan "Operasi Harta Karun", pemerintahan Soeharto berhasil meningkatkan produksi dalam sektor industri, pertanian, dan pertambangan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

Meskipun banyak proyek pembangunan besar dilakukan di bawah pemerintahan Orde Baru, terdapat juga kritik terhadap cara pemerintahan tersebut mengelola pembangunan nasional. Kritik meliputi isu korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, meskipun pemerintahan Orde Baru telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional Indonesia, evaluasi terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik dari periode tersebut tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1-26.
- Budiman, L., & Hastangka, H. (2020). Nawacita, Pancasila, Dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 148-154.

- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Hariyadi Reza, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *Jurnal desentralisasi dan kebijakan public*, 2(2), 259-276.
- Jenar, S. (2022). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. *Justitia et pax*, 38(1), 173-207.
- Nurjaman, I. M., Samsudin, S., & Sulasman, S. (2022). Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama- Agama*, 5(1), 59-70.
- Octavia, N. N. (2022). *Tinjauan Siyazah Dusturiyah Terhadap Perbandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru Dan Reformasi (Studi Perencanaan Pembangunan Model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dan Model Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Purwanto, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa orde baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1-15.
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), 111-128.
- Septaviana, S., & Razak Abdul, M. (2022). Model Gbhn Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945. *Sultan jurisprudence*, 2, 123-135.
- Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 20-50
- Taufikurrahman, T., & Hidayat, W. (2020). Dinamika Politik Kelas Menengah Indonesia: Pergulatan Politik ICMI Membangun Demokrasi Di Era Orde Baru. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3(2), 149-168.